

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II KERANGKA TEORI	18
A. Penelitian Terdahulu Mengenai Outsourcing	18
B. Penelitian Terdahulu Terkait dengan Implementasi Kebijakan	31
C. Definisi Konsep (Indikator)	39
D. Operasional Konsep	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45

C. Obyek dan Subyek Penelitian	46
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Keabsahan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data	56
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OUTSOURCING JASA KEAMANAN DI DIY	59
A. Profil Umum Ketenagakerjaan di DIY	59
B. Gambaran Umum Kebijakan Outsourcing Sesuai Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012.....	64
C. Kebijakan Outsourcing Jasa Keamanan	75
D. Profil Umum Pelaku Outsourcing Jasa Tenaga Keamanan	82
BAB V HASIL PENELITIAN.....	91
A. Komparasi Implementasi Kebijakan Outsourcing Jasa Tenaga Keamanan Di DIY	91
A.1. Komparasi Implementasi Outsourcing Antar Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	92
A.1.1. Jaminan Kelangsungan Bekerja Pekerja <i>Outsourcing</i> Jasa Tenaga Keamanan	92
A.1.2. Jaminan Terpenuhinya Hak Hak Pekerja <i>Outsourcing</i> Jasa Tenaga Keamanan	93
A.1.3. Jaminan Perhitungan Masa Kerja Pekerja <i>Outsourcing</i> Jasa Tenaga Keamanan	99
B. Komparasi Implementasi Kebijakan Outsourcing Sektor Publik (Pemerintah) dan Sektor Swasta (Perusahaan)	101
B.1. Implementasi Kebijakan Outsourcing Sektor Publik (Pemerintah)	101
B.1.1. Jaminan Kelangsungan Bekerja Pekerja <i>Outsourcing</i> Jasa Tenaga Keamanan	113

B.1.2. Jaminan Terpenuhi Hak Hak Pekerja <i>Outsourcing</i> Jasa Tenaga Keamanan	114
B.1.3. Jaminan Perhitungan Masa Kerja Pekerja <i>Outsourcing</i> Jasa Tenaga Keamanan	116
B.2. Implementasi Kebijakan Outsourcing Sektor Swasta (Perusahaan)	118
B.2.1. Tujuan Perusahaan Pemberi Kerja Menyerahkan pekerjaan penunjang pada sistem <i>outsourcing</i>	118
B.2.2. Jaminan Kelangsungan Bekerja Pekerja <i>Outsourcing</i> Jasa Tenaga Keamanan	126
B.2.3. Jaminan Terpenuhi Hak Hak Pekerja <i>Outsourcing</i> Jasa Tenaga Keamanan	128
B.2.4. Jaminan Perhitungan Masa Kerja Pekerja <i>Outsourcing</i> Jasa Tenaga Keamanan	133
BAB VI KENDALA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OUSOURCING JASA TENAGA KEAMANAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	140
A. Isi Kebijakan.....	141
B. Tingkat Kepatuhan.....	142
C. Informasi	145
D. Dukungan.....	147
E. Pembagian Potensi	149
BAB VII PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Rekomendasi Kebijakan	159
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	